



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KERJA SAMA INDONESIA – AUSTRALIA DALAM
UPAYA PENGIMPLEMENTASIAN MEKANISME
REDD+ DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
MELALUI PROYEK KALIMANTAN FORESTS &
CLIMATE PARTNERSHIP (KFCP)**

Skripsi

Oleh

Dinda Nur Griya Kamil

2013330084

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KERJA SAMA INDONESIA – AUSTRALIA DALAM
UPAYA PENGIMPLEMENTASIAN MEKANISME
REDD+ DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
MELALUI PROYEK KALIMANTAN FORESTS &
CLIMATE PARTNERSHIP (KFCP)**

Skripsi

Oleh

Dinda Nur Griya Kamil

2013330084

Pembimbing

Prof. Victorianus Bob Sugeng Hadiwinata, Drs., M.A., Ph.D.

Bandung

2017



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Dinda Nur Griya Kamil
Nomor Pokok : 2013330084
Judul : Kerja Sama Indonesia – Australia dalam Upaya
Pengimplementasian Mekanisme REDD+ di Wilayah
Kalimantan Tengah Melalui Proyek Kalimantan Forests &
Climate Partnership (KFCP)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 10 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

: 

Sekretaris merangkap pembimbing

Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Drs., M.A., Ph.D. :

: 

Anggota

Giandi Kartasasmita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Nur Griya Kamil

NPM : 2013330084

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kerja Sama Indonesia – Australia dalam Upaya

Pengimplementasian Mekanisme REDD+ di Wilayah Kalimantan

Tengah Melalui Proyek Kalimantan Forests & Climate

Partnership (KFCP)

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Januari 2017



Dinda Nur Griya Kamil

Abstrak

Nama : Dinda Nur Griya Kamil

NPM : 2013330084

Judul : Kerja Sama Indonesia – Australia dalam Upaya Pengimplementasian Mekanisme REDD+ di Wilayah Kalimantan Tengah Melalui Proyek Kalimantan Forests & Climate Partnership (KFCP)

Fenomena perubahan iklim yang terjadi pada bumi, tempat tinggal seluruh makhluk hidup, telah menjadi fokus dunia internasional sampai pada saat ini. Para pemimpin negara saling bekerja sama dan berupaya untuk menanggulangi permasalahan ini serta menemukan solusi yang tepat untuk mengurangi dampak yang dihasilkan dari perubahan iklim. Melalui UNFCCC, harapan atas solusi dari perubahan iklim telah muncul dan REDD+ lahir sebagai sebuah mekanisme penanggulangan perubahan iklim melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan.

Dalam mendukung REDD+, Indonesia bersama dengan Australia menjalankan sebuah proyek kerja sama di Kalimantan Tengah yang kemudian disebut dengan KFCP (*Kalimantan Forest & Climate Partnership*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil dari kerja sama yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dan Australia. Penulis juga akan menganalisis faktor internal dan eksternal yang tentunya ikut mempengaruhi hasil dari pelaksanaan proyek KFCP.

Kata kunci : kerja sama, Indonesia – Australia, perubahan iklim, REDD+, KFCP

Abstract

Name : Dinda Nur Griya Kamil

NPM : 2013330084

Title : *Indonesia – Australia Cooperation As An Effort In Implementing REDD+ Mechanism in Central Kalimantan Through Kalimantan Forests & Climate Partnership (KFCP)*

Climate change has become a phenomenon that challenges the world leaders to cooperate and provide a collective solution for the issue. Through the UNFCCC, the REDD+ emerges as a mechanism to solve climate change which includes deforestation and forest degradation.

In attempt to support REDD+, Indonesia and Australia executed a project together in Central Kalimantan - also known as KFCP (Kalimantan Forests & Climate Partnership). Then, this research aims to analyze the result of this partnership as well as the internal and external factors that contributed to its results.

Keywords : *cooperation, Indonesia – Australia, climate change, REDD+, KFCP*

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang atas izin-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kerja Sama Indonesia – Australia dalam Upaya Pengimplementasian Mekanisme REDD+ di Wilayah Kalimantan Tengah Melalui Proyek Kalimantan Forests & Climate Partnership (KFCP) adalah skripsi yang ditulis penulis sebagai syarat untuk menempuh kelulusan dari program studi Strata 1 (S1) jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan.

Di dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukannya kekurangan dan hal-hal yang tersampaikan secara kurang baik. Dengan begitu, penulis sangat terbuka untuk pemberian kritik serta saran bagi para pembaca skripsi ini.

Harapannya, skripsi ini dapat bermanfaat untuk membantu serta menjadi salah satu referensi, acuan, atau literatur peneliti lainnya yang mengkaji topik serupa dengan topik skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan, terima kasih.

Bandung, 4 Januari 2017

Dinda Nur Griya Kamil

Ucapan Terima Kasih



“Ya Allah, permudahkanlah urusanku dan janganlah Engkau persulit” adalah doa yang selalu dipanjatkan penulis untuk memohon kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi, sebagai syarat lulus studi S1 Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan dan Maha Besar Allah yang telah mengkabulkan doa ini dan mengizinkan penulis untuk menyelesaikan studinya dalam waktu 3,5 tahun. Terima kasih Ya Allah.

Mamah, Ayah, Uwa-uwa, dan semua Keluarga Kamil adalah pemberi semangat nomor satu dan melalui semua doa-doanya juga yang sangat membantu penulis dalam menempuh studi di masa kuliah ini. Terima kasih.

Mas Bob, dosen pembimbing skripsi yang sangat luar biasa dalam memberikan bimbingan, ilmu, dan juga cerita-cerita di sela bimbingan. Terima kasih.

Mas Apres, Mas Pur, Mas Gi, Mba Nophie, Mba Sylvi, Mba Ratih, Mas Abe dan semua dosen-dosen kebanggan HI Unpar dan tidak lupa untuk Mba Is beserta jasanya dalam membantu memudahkan mahasiswa mengurus segala hal administratif sekaligus juga salam serta semangat yang selalu diberikannya kepada mahasiswa. Terima kasih.

Prinka Apriati Penesa, *my unbiological sister* yang selalu ada, selalu mau direpotin, selalu mau dicurhatin segala hal, dari SMP waktu pertama kenal, sampai kemarin

nunggu sidang-selesai yudisium-dapat gelar S.IP, sampai detik ini, dan sampai seterusnya ya. Terima kasih.

Mashita Dyah, Emerald Aisha, April, Indira adalah teman-teman yang rasanya sudah seperti keluarga sendiri yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan bahwa Dinda bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih.

Nabila, Tya, Bella, Dyaning, Farizi, Angel, Adella, Derin adalah teman-teman sekaligus keluarga semasa kuliah dan seterusnya yang selalu mau mendengarkan keluh kesah tentang skripsi maupun tentang *my-other-life-stuff*. Terima kasih.

KSM PMI 13/14, KSM PMI 14/15, KSM PMI 15/16 yang sudah berbagi ilmu, suka cita dalam menjalankan fungsi, dan cerita-cerita semasa bertugas. Terima Kasih.

Delegasi PNMHII XXV, PSNMHII XXVI, PNMHII XXVI beserta perjuangannya untuk meraih *best delegation*. Menjadi *head delegation* setelah sebelumnya menjadi satu-satunya delegasi maba adalah pengalaman yang paling berkesan. Serta teman-teman kepanitian GINTRE 2013, PIC 2015, SDC Prakdip 2015, Cinefest 2015, FON 2016. Juga teman-teman di PGC 2015, ISC 2015 yang telah melengkapi cerita buku pesta cinta di Kampus Tiga. Terima kasih.

#finishstrong, liburan bersama Lauk, GAMax. Hhe, Geng Bruh, Wild semua penghuni kelompok-kelompok kecil di *Line* ini yang melengkapi cerita-cerita semasa kuliah. Terima kasih.

Delegasi Suriah untuk Praktik Diplomasi 2016, Abel-Ishna-Nabila-Angel dan usaha perjuangan kita membawa Assad bersama Suriahnya di *Counter Terrorism Summit* 2016. Terima kasih.

Muhammad Fakhri, Angga, Aji, Mauren, Herdiani Dewi, Amelinda, Kinan, Dion, Andra, Jediza, Dara, Nida, Vina, dan semua keluarga besar HI 2013 yang sudah berbagi cerita, memberikan bantuan, sampai saling berjuang di sini. Terima kasih.

Yoan, teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi dari mulai nunggu Mas Bob untuk sidang seminar sampai sama-sama berjuang di Eduplex untuk menyelesaikan skripsi dan akhirnya bisa cetak *draft* hijau. Terima kasih.

Feby Elvani, Grace Jessy, dan Daniel Tantra adalah adik-adik yang melengkapi cerita semasa kuliah. Semangat untuk prakdip, seminar, skripsi dan hal-hal lain yang perlu diselesaikan di HI Unpar ini. Terima kasih.

Last but not least, Greeneration Foundation, Kak Ines, Kak Tian, Kak Via, Kak Epul, Kak Mikha, Kak Gagas, Bu Nung yang sangat membantu dalam menjalankan program magang selama kurang lebih 6 bulan kemarin. Ilmu dan pengalaman yang dibagi sangat bermanfaat, terima kasih. Terus semangat menebarkan kebaikan untuk Bumi!

“Sometimes the little things in life mean the most.” Terima kasih semua!

Daftar Isi

Abstrak.....	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Singkatan	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.1 Deskripsi Masalah	7
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	11
1.2.1 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian	13

1.4 Kajian Literatur	14
1.4.1 Kajian Literatur.....	14
1.4.2 Kerangka Pemikiran	20
1.5 Metode Penelitian	27
1.5.1 Metode Penelitian	27
1.5.2 Jenis Penelitian	28
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	29
1.6 Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II KERJA SAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM	
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DAN PENINGKATAN	
KONDISI HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH	31
2.1 Kerja Sama Indonesia dan Australia dalam Menangani Isu Iklim	32
2.2 Isu Perubahan Iklim	35
2.2.1 Penyebab Perubahan Iklim	39
2.2.2 Dampak Perubahan Iklim	41
2.3 Emisi Gas Rumah Kaca	44
2.4 Pentingnya Hutan Tropis di Kalimantan Tengah	46
2.4.1 Kondisi Hutan di Kalimantan Tengah	47
2.4.2 Deforestasi di Kalimantan Tengah	50

BAB III SISTEM REDD+ DALAM PROYEK KFCP DAN HASIL KERJA	
PROYEK KFCP.....	57
3.1 <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (UNFCCC)	58
3.2 Konsep REDD+	61
3.2.1 Perkembangan Mekanisme REDD menjadi REDD+	65
3.2.2 Sistematika Kerja REDD+ dan Perdagangan Karbon	67
3.3 REDD+ di Indonesia	73
3.4 Proyek <i>Kalimantan Forests and Climate Partnership</i> (KFCP)	76
3.4.1 Perkembangan dan Permasalahan Pada Proyek KFCP	81
3.5 Analisa Faktor Penyebab Kegagalan Proyek KFCP	87
3.5.1 Faktor Internal Dalam Kegagalan Proyek KFCP.....	88
3.5.2 Faktor Eksternal Dalam Kegagalan Proyek KFCP	93
BAB IV KESIMPULAN.....	96
Daftar Pustaka	99

Daftar Gambar

Gambar 2.1.1 Sepuluh indikator perubahan iklim	37
Gambar 2.1.2 Suhu Global Tahun 1880-2014	38
Gambar 2.3.1.2 Potret nyata kondisi hutan di Kalimantan Tengah	50
Gambar 2.3.2.1 Tingkat Deforestasi di Borneo (Indonesia-Kalimantan, Brunei Darussalam, Malaysia Tahun 1950-2005 dan Proyeksi Deforestasi di Tahun 2020	54
Gambar 2.3.2.2 Deforestasi di Kalimantan Tengah.....	55
Gambar 3.2.2.1 Konsep skema pembayaran jasa lingkungan bertingkat ganda untuk REDD+.....	69
Gambar 3.2.2.2 Mengukur Jumlah Karbon dalam Hutan	71
Gambar 3.3.1 Lima Pilar Strategi Nasional REDD+ di Indonesia	75
Gambar 3.4.1 Lokasi Proyek KFCP.....	79

Daftar Tabel

Tabel 2.3.1.1 Kondisi Kawasan Hutan Produksi Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Keadaan Penutupan Lahan	48
--	----

Daftar Singkatan

AOSIS	: <i>Alliances of Small Island Developing States</i>
AWG-LCA	: <i>Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention</i>
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
CIFOR	: <i>Center for International Forestry Research</i>
COP	: <i>Conference of Parties</i>
COMIFAC	: <i>Commission des Forets d’Afrique Centrale</i>
GISS	: <i>Goddard Institute of Space Studies</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
IAFCP	: <i>Indonesia – Australia Forest Carbon Partnership</i>
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
KFCP	: <i>Kalimantan Forests and Climate Partnership</i>
MLG	: <i>Multi-level Governance</i>
NOAA	: <i>National Oceanic and Atmospheric Administration</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLG	: Proyek Lahan Gambut

RED : *Reducing Emissions from Deforestation*

REDD : *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*

SEM : *Sustainable Forest Management*

UNFCCC : *United Nations Framework Convention on Climate Change*

YPD : Yayasan Petak Danum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak berakhirnya Perang Dingin, pertahanan dan keamanan tidak lagi menjadi satu-satunya isu yang dibahas oleh dunia internasional. Saat ini, isu-isu non-tradisional yang lebih spesifik mulai menjadi fokus perhatian dunia internasional dan salah satunya adalah isu tentang lingkungan hidup. Keadaan lingkungan saat ini semakin hari semakin meresahkan manusia dan hal ini disebabkan oleh tingginya aktifitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam termasuk menebang pohon untuk memenuhi berbagai kepentingan manusia khususnya bagi para pengusaha yang menggunakan bahan baku pohon. Pohon yang ditebang dari hutan secara terus-menerus, tanpa melakukan penanaman pohon kembali pada hutan yang telah gundul atau tandus dapat menyebabkan deforestasi.

Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan pohon untuk diambil kayunya atau mengubah fungsi lahan hutan menjadi non-hutan dan bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang dilakukan secara sengaja ataupun terjadi secara alami.¹ Hutan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas lingkungan. Hutan dapat mengurangi terjadinya perubahan iklim karena hutan merupakan salah satu

¹ Cecep Risnandar, *Deforestasi*, <https://jurnalbumi.com/deforestasi/>, diperbaharui pada tanggal 3 Agustus 2016, diakses pada tanggal 28 Agustus 2016 pukul 23.16 WIB.

penampung karbon terbesar, sehingga hutan memiliki fungsi untuk membantu menjaga daur karbon dan hutan juga memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penyerap CO₂ atau karbon dioksida yang keluar dari atmosfer.² Dengan begitu hutan dapat membantu mengurangi terjadinya perubahan iklim.

Maka, keberadaan hutan di bumi ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengendalikan fenomena perubahan iklim yang sedang terjadi pada bumi ini. Studi ilmiah mengatakan bahwa antara 12% hingga 17% dari semua CO₂ yang dikirim ke atmosfer adalah dari aktifitas manusia yang berasal dari perusakan hutan.³ Peristiwa inilah yang mengenalkan kita pada istilah pemanasan global, kondisi di mana suhu bumi menjadi menghangat dari suhu normal. Kenaikan suhu muka bumi global atau pemanasan global (*global warming*) merupakan salah satu bentuk dari apa yang kita sebut dengan perubahan iklim. Perubahan iklim ini memiliki pengertian yaitu sebagai perubahan variabel iklim yang terjadi secara berangsur-angsur dengan jangka waktu sekitar 50 hingga 100 tahun dengan variabel iklim yang dimaksud antara lain adalah temperatur atau suhu udara, kelembaban udara, tekanan atmosfer, kondisi awan, intensitas sinar matahari, curah hujan, dan angin.⁴ Perubahan iklim merupakan fenomena yang menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan pada bumi dan seluruh makhluk hidup yang berada di dalamnya.

² Susan Stone, Mario Chacón León, Patricia Fredericks, *Perubahan Iklim dan Peran Hutan*, Conservation International, 2010, hlm. 19.

³ G. R. van der Werf, D. C. Morton, R. S. DeFries, J. G. J. Olivier, P. S. Kasibhatla, *et al*, *CO₂ emissions from forest loss*, Vol 2, 2009.

⁴ Nawa Suwedi, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Pemanasan Global*, Ejournal-BPPT, Vol 6 (2), 2005, hlm. 397.

Permasalahan di atas sangat menjelaskan bahwa perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan penstabilan suhu rata-rata bumi, namun hal ini akan menjadi hal yang tidak mungkin terjadi ketika tidak ada pencapaian yang dilakukan manusia secara nyata dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca adalah dengan mempertahankan fungsi hutan dan menjaga hutan agar tidak ditebangi secara tidak bertanggung jawab. Dalam menyikapi fenomena ini dunia tentu tidak diam dan mulai menanggapi serta mencari solusi yang dapat dilakukan negara-negara untuk memecahkan masalah ini, khususnya bagi para negara yang menghasilkan banyak karbon. Hal ini yang mendorong hampir seluruh negara di dunia berkumpul untuk merumuskan suatu kebijakan dalam menanggapi isu perubahan iklim dan perumusan kebijakan internasional ini dipimpin oleh sebuah organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa terdapat suatu badan yang bekerja untuk mengatur negara-negara dalam merumuskan kebijakan mengenai perubahan iklim, badan ini bernama Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). UNFCCC mengadakan pertemuan untuk menyusun kebijakan penting setiap tahunnya dan melalui UNFCCC ini setiap negara dapat berunding sehingga membuat suatu keputusan yang akhirnya dijadikan sebuah kebijakan yang dapat disepakati bersama mengenai cara untuk menghadapi perubahan iklim.⁵ Salah satu

⁵ *Ibid.*

kesepakatan paling utama yang dihasilkan dari UNFCCC ini adalah kesepakatan setiap negara untuk berjanji mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), gas yang menimbulkan efek rumah kaca, penyebab utama perubahan iklim, serta mencari cara atau inovasi baru yang dapat menciptakan energi yang menghasilkan emisi CO₂ lebih sedikit.⁶ Kesepakatan utama ini kemudian disebut dengan Protokol Kyoto.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, negara-negara maju telah berjanji untuk mengurangi jumlah gas rumah kaca atau emisi gas rumah kaca yang mereka lepaskan dan pancarkan ke atmosfer. Kesepakatan ini melahirkan sebuah mekanisme perdagangan karbon (*carbon trading*) di mana negara maju membeli kredit karbon dari para pemilik hutan di negara-negara berkembang dengan cara membayar mereka untuk tidak melakukan penebangan pohon dan menjaga hutan tersebut agar karbon dalam pohon tetap terjaga sehingga hal ini dapat menyerap karbon yang sebelumnya telah dihasilkan oleh negara maju dan mencegah emisi gas rumah kaca.⁷ Melalui perdagangan karbon ini negara maju akan membuat suatu kesepakatan dengan negara berkembang atau pemilik hutan untuk melestarikan hutan mereka dan menjaga karbon yang tersimpan dalam pohon. Perdagangan karbon ini merupakan cara kerja atau mekanisme yang disebut dengan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi. Mekanisme adalah cara

⁶ *Ibid.*

⁷ Susan Stone, *et al*, *Op.cit*, hlm. 44.

kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).⁸ Dalam hal ini REDD merupakan cara kerja utama dari UNFCCC. REDD sebagai keputusan yang dihasilkan UNFCCC pada Konferensi Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim ke-13 atau *Conference of the Parties* (COP 13) di Bali ini adalah sebuah inisiatif kolaboratif PBB yang dihasilkan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam berbagai proyek REDD yang akan dilaksanakan di negara-negara berkembang dan diluncurkan pada tahun 2008.⁹

REDD dalam usahanya mencapai misi tersebut akan memberikan insentif bagi para negara berkembang yang melakukan usahanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menjaga lahan hutannya serta melakukan investasi karbon secara berkelanjutan.¹⁰ Mekanisme REDD ini telah meluas dengan tidak hanya melibatkan negara dan perusahaan-perusahaan terkait, namun juga peran masyarakat setempat dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara menjaga hutan tropis agar tidak ditebangi. Dengan begitu istilah REDD berubah menjadi REDD+ untuk memasukkan jasa hutan ini ke dalam diskusi serta aktor yang menjalankan program ini.¹¹ REDD+ merupakan sebuah upaya para negara yang diharapkan mampu mengurangi terjadinya perubahan iklim.

Sebagai negara berkembang yang memiliki hutan cukup luas di pulau-pulainya, Indonesia turut mendukung program REDD+ sebagai upayanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Didukung dengan Australia sebagai negara

⁸ *Pengertian Mekanisme*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/mechanisme>, diakses pada tanggal 2 April 2016 pukul 21.00 WIB.

⁹ *About REDD+*, UN-REDD, <http://www.un-redd.org/aboutredd>, diakses pada tanggal 2 April 2016 pukul 21.03 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Susan Stone, *et al*, *Op.cit*, hlm. 38.

yang juga ikut menghasilkan emisi gas rumah kaca, Indonesia dan Australia melakukan komitmen dalam kerja sama bilateral untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di hutan Indonesia yang selanjutnya kerja sama ini disebut dengan *Indonesia–Australia Forest Carbon Partnership* (IAFCP). IAFCP dikelola bersama oleh Departemen Perubahan Iklim Australia dan AusAID sebagai upaya dalam mendukung REDD+ dengan memberikan dukungan dana serta dukungan teknis dalam pengembangan sistem penghitungan karbon hutan nasional di Indonesia.¹² Salah satu proyek terbesar dari IAFCP adalah *Kalimantan Forests & Climate Partnership* (KFCP). KFCP adalah sebuah proyek untuk mengimplementasikan mekanisme REDD+ yang menunjukkan pendekatan yang kredibel, adil, dan efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, termasuk dari degradasi lahan basah yang berada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.¹³ Proyek KFCP merupakan salah satu proyek percontohan dari pengimplementasian mekanisme REDD+ di Indonesia.

Sebagai proyek percontohan mekanisme REDD+, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sorotan dunia dan menjadi tujuan investasi REDD+ termasuk untuk melakukan proyek KFCP ini.¹⁴ KFCP merupakan salah satu proyek IAFCP yang sudah mulai disusun sejak tahun 2008 dan akan berakhir pada tahun 2012. Australia melalui AusAID berkomitmen untuk memberikan dana bantuan sebesar

¹² *Indonesia Australia Forest Carbon Partnership*, the REDD desk, <http://theredddesk.org/countries/initiatives/indonesia-australia-forest-carbon-partnership>, diakses pada tanggal 2 April 2016 pukul 21.16 WIB.

¹³ Australia Indonesia Partnership, *Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) Design Document*, 2009, hlm. 2.

¹⁴ *KFCP CSOs Appeal Letters*, Forest Climate Center, 2010, <http://forestclimatecenter.org/redd/2010-2011%20KFCP%20CSOs%20Appeal%20Letters.pdf>, diakses pada tanggal 2 April 2016 pukul 23.10 WIB.

30.000.000 dolar Australia untuk membangun proyek ini dengan tambahan 1.400.000 dolar Australia sebagai estimasi biaya pengukuran dan pengawasan gas rumah kaca.¹⁵ Dengan begitu dapat diketahui bahwa latar belakang Indonesia-Australia melakukan kerja sama melalui proyek KFCP ini adalah untuk mewujudkan komitmen internasional dalam mengimplementasikan mekanisme REDD+ sebagai salah satu upaya kedua negara mengurangi perubahan iklim dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, kerja sama ini juga didasari dengan fakta yang terjadi di mana kedua negara ini sama-sama termasuk negara penyumbang emisi gas rumah kaca yang besar di dunia.

Maka dari itu berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan mencari tahu tentang hasil dari proyek KFCP dengan mengambil topik penelitian yaitu, “**Kerja Sama Indonesia – Australia dalam Upaya Pengimplementasian Mekanisme REDD+ di Wilayah Kalimantan Tengah Melalui Proyek *Kalimantan Forests & Climate Partnership* (KFCP)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Program REDD bekerja dengan cara melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca termasuk gas rumah kaca dan menghindari deforestasi yang kemudian dapat diperhitungkan sebagai kredit karbon. Jumlah kredit karbon yang diperoleh

¹⁵ Australia Indonesia Partnership, *Op.cit*, hlm. 1.

dalam waktu tertentu ini dapat dijual di pasar karbon internasional atau diserahkan ke lembaga pendanaan yang dibentuk untuk menyediakan kompensasi finansial bagi negara-negara berkembang yang melakukan konservasi hutan dan telah menjaga karbonnya.¹⁶ Mekanisme dari REDD ini memicu para negara maju untuk melakukan perdagangan karbon dengan negara-negara berkembang yang memiliki potensi untuk dilakukannya transaksi kredit karbon. Dengan menjalankan mekanisme ini, selain menjual kredit karbon untuk mengurangi CO₂ di udara, namun negara berkembang serta pemilik hutan juga memperoleh keuntungan dari tidak menebang pohon. Setelah para negara saling bertransaksi untuk mendukung mekanisme ini, masyarakat lokal yang lebih banyak berinteraksi langsung dengan pemanfaatan hutan mulai dilibatkan peranannya untuk turut menjaga hutan agar seluruh elemen dapat mendukung program ini. Hal tersebut merupakan mekanisme REDD+ yang kemudian melahirkan berbagai proyek kerja sama antara negara maju dan berkembang untuk mendukung mekanisme ini.

Kalimantan Forests & Climate Partnership (KFCP) merupakan proyek besar serta proyek percontohan IAFCP yang menjadi komitmen Indonesia dan Australia dalam mewujudkan pengurangan emisi gas rumah kaca di hutan dan lahan basah Kalimantan Tengah. KFCP telah dibangun sejak tahun 2008 dan direncanakan akan berakhir hingga tahun 2010. Namun, secara resmi KFCP menjadi salah satu proyek yang turut mendemonstrasikan mekanisme REDD+ di

¹⁶ *REDD: Apakah itu? Pedoman CIFOR Tentang Hutan, Perubahan Iklim dan REDD*, CIFOR, 2010, hlm. 4.

Indonesia ini diluncurkan pada Januari 2010.¹⁷ Proyek ini banyak sekali memberi harapan akan hasil serta perubahan yang signifikan secara nyata, baik oleh masyarakat lokal maupun pihak pendonor, sehingga proyek ini diputuskan untuk diperpanjang hingga tahun 2014. Namun, pada kenyataannya proyek tersebut mulai banyak diperdebatkan beberapa pihak dan menjadi tidak kondusif dijalankan bahkan terancam terhenti di tahun 2013. Akhirnya proyek ini tetap secara resmi diakhiri di tahun 2014.¹⁸ Hal ini ditandai dengan penghentian dana bantuan yang dilakukan pihak AusAID pada saat itu. Peristiwa ini telah menggambarkan bahwa ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek KFCP. Selain itu, proyek ini bisa dikatakan gagal karena kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa banyak pihak yang merasa dirugikan dari pelaksanaan proyek KFCP.¹⁹

Peran Australia sebagai negara besar yang memberikan donor pada Indonesia dalam proyek KFCP ini membuat Australia memiliki peran yang kuat sebagai kunci utama dalam forum kerja sama ini. Kerja sama ini telah membantu Australia dalam mengupayakan kapasitasnya untuk ikut serta meningkatkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut yang mendorong Australia memiliki andil yang cukup besar dalam keputusan serta metode apa saja yang dapat diaplikasikan dalam proyek ini. Namun, hal ini melahirkan perbedaan

¹⁷ Stibniati S Atmadja, *et al*, *Kalimantan Forests and Climate Partnership, Central Kalimantan, Indonesia*, REDD+ On The Ground, <http://www.cifor.org/redd-case-book/case-reports/indonesia/kalimantan-forests-climate-partnership-central-kalimantan-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 April 2016 pukul 22.54 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Forest Climate Center, *KFCP CSOs Appeal Letters*, 2010, <http://forestclimatecenter.org/redd/2010-2011%20KFCP%20CSOs%20Appeal%20Letters.pdf>, diakses pada tanggal 2 April 2016 pukul 23.10 WIB.

pendapat antara masyarakat setempat sebagai pemilik lahan dan Australia sebagai pendonor proyek.

Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan proyek KFCP. Misalnya, terdapat informasi yang tumpang tindih pada masyarakat lokal sehingga memperlambat keberlangsungan pelaksanaan proyek ini. Hal lainnya yang menyebabkan terjadinya kegagalan pada proyek KFCP adalah pelaksana proyek ini telah melakukan tekanan dan intimidasi terhadap warga yang tidak setuju dengan kehadiran proyek perubahan iklim ini, karena proyek REDD ini dianggap mengancam hak-hak adat masyarakat setempat, khususnya masyarakat di 14 desa/dusun lokasi proyek.²⁰ Sebuah wawancara di *ABC's The World Today* dengan seorang pengurus proyek untuk perhutanan, *Patrick Anderson* menjelaskan bahwa ketika ia melakukan survey pada proyek KFCP telah melihat bahwa tidak adanya dukungan signifikan dari masyarakat setempat dan ia menyimpulkan bahwa proyek ini adalah proyek yang menghabiskan dana sangat banyak namun menghasilkan hasil yang sangat kecil.²¹ Secara tidak langsung, proyek ini tidak memiliki kesepakatan bersama antara masyarakat lokal dan pihak pendonor.

Selama kehadiran proyek ini juga membuat warga masyarakat lokal menjadi resah akan konflik yang terjadi antar sesama warga yang berdampak pada hilangnya persaudaraan, menimbulkan sikap saling curiga, dan tidak ada lagi

²⁰ *Ibid.*

²¹ Chris Lang, *Australia shuts down the Kalimantan Forest Carbon Partnership: "A lot of funds spent and very little progress*, REDD Monitor, 2013, <http://www.redd-monitor.org/2013/07/04/australia-shuts-down-the-kalimantan-forest-carbon-partnership-a-lot-of-funds-spent-and-very-little-progress/>, diakses pada tanggal 2 April 2016 pukul 23.05 WIB.

kedamaian yang tercipta di wilayah lokasi proyek.²² Begitu banyak masalah yang ditemukan selama pelaksanaan proyek KFCP dan tentu hal ini dianggap merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sehingga hal ini memicu terjadinya indikator kegagalan proyek KFCP dan peristiwa ini yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini.

Fenomena ini mencerminkan adanya peristiwa yang kontradiktif dari komitmen yang telah disepakati bersama oleh Indonesia dan Australia dalam upayanya mendukung program REDD+ melalui perjanjian kerja sama IAFCP dengan melaksanakan salah satu proyeknya yakni KFCP. Komitmen di antara kedua negara nampaknya tidak begitu terlaksana mengingat dari hasil yang telah didapat dari melaksanakan proyek KFCP ini tidak sesuai dengan tujuan utama dari proyek tersebut.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membahas bagaimana hasil dari kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Australia sebagai bentuk upaya pengimplementasian mekanisme REDD+ di Kalimantan Tengah melalui proyek *Kalimantan Forests and Climate Partnership* (KFCP). Penulis akan mencari informasi tentang bagaimana proyek ini berjalan dan masalah apa saja yang terjadi dibalik kerja sama ini sehingga munculnya pemicu kegagalan yang bahkan menyebabkan penghentian dana bantuan yang dilakukan oleh pihak pendonor, AusAID dalam

²² Forest Climate Center, *Op.cit.*

pelaksanaan proyek KFCP. Batasan waktu yang ditetapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Jangka waktu ini sesuai dengan lini masa pelaksanaan proyek KFCP pada saat proyek ini resmi diluncurkan sebagai salah satu proyek yang mengadopsi mekanisme REDD+. Penulis juga mengambil wilayah Kalimantan Tengah, Indonesia sebagai tempat dimana dilaksanakannya proyek KFCP.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis akan memfokuskan penelitian terhadap hasil yang didapat dari pelaksanaan proyek *Kalimantan Forests & Climate Partnership* (KFCP), maka penelitian ini memiliki perumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana kerja sama Indonesia dan Australia dalam upaya pengimplementasian mekanisme REDD+ di wilayah Kalimantan Tengah melalui proyek *Kalimantan Forests & Climate Partnership* (KFCP)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait komitmen kerja sama Indonesia dan Australia dalam mendukung program REDD+ tentang penanggulangan isu pengurangan emisi gas rumah kaca di area hutan Kalimantan Tengah, Indonesia. Serta memberikan informasi bagaimana kerja sama bilateral Indonesia dan Australia tersebut berjalan dan bagaimana hasil akhir yang didapat dari pelaksanaan proyek *Kalimantan Forests & Climate Partnership* (KFCP) ini.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini selesai, penulis berharap penelitian ini akan menjadi salah satu sarana para peneliti lain untuk membantu menganalisis kasus terkait kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia bersama pemerintah negara lain dalam menanggulangi isu perubahan iklim dan kasus kerusakan hutan di Indonesia. Selain itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat berguna untuk mencegah terjadinya pengulangan permasalahan serupa dalam proyek seperti pada penelitian ini di masa yang akan datang dalam aktivitas kerja sama serupa seperti dalam kasus yang terjadi pada penelitian ini.

1.4 Kajian Literatur

1.4.1 Kajian Literatur

Pertama, penulis *Doug Boucher, Sarah Roquemore, dan Estrellita Fitzhugh* dalam penulisan penelitiannya berjudul *Brazil's Success in Reducing Deforestation* yang diterbitkan oleh *Tropical Conservation Science Journal - Special Issue*, Vol.6 (3):426-445, mengalisis tentang keberhasilan proyek REDD+ di Brasil. Hal yang telah dicapai oleh Brasil dalam membantu mencegah konsekuensi terburuk dari pemanasan global adalah hal-hal seperti yang telah dijanjikan negara-negara maju di dunia untuk solusi pemanasan global tahun 2020, seperti Amerika Serikat telah berjanji untuk mengurangi 17 persen emisi gas rumah kaca di tahun 2005, yang berjumlah 1.200 juta ton dan Uni Eropa yang telah berjanji mengurangi 20 persen emisi gas rumah kaca di 1990, yang berjumlah sekitar 850 juta ton.²³ Sejak tahun 2008, tingkat deforestasi di Brasil menurun secara berkala hingga 2011 dan prestasi Brasil dalam proyek REDD+ merupakan hasil kerja dari banyak aktor, termasuk pemerintah (baik di tingkat federal dan negara bagian, dan termasuk orang-orang dari negara pendonor yaitu Norwegia), serta aktor pada sektor bisnis, masyarakat lokal, serta LSM.²⁴

Hal-hal yang telah Brasil lakukan untuk mencapai keberhasilan ini yaitu, pertama, menyusun kerangka kerja, Brasil menunjukkan keseriusan komitmennya untuk memerangi deforestasi dengan memasukkannya ke dalam undang-undang pada akhir Desember 2009 di mana Hukum Perubahan Iklim tersebut merupakan

²³ Doug Boucher, Sarah Roquemore, Estrellita Fitzhugh, *Brazil's Success in Reducing Deforestation*, *Tropical Conservation Science Journal*, Vol.6 (3):426-445, 2013.

²⁴ *Ibid.*

komitmen untuk mengurangi keseluruhan emisi antara 36,1% dan 38,9%, dan hal ini setara dengan pengurangan 20% emisi yang dilakukan Brasil dari tingkat emisi di tahun 2005, kedua, melindungi tanah adat dan kawasan lindung, banyak keberhasilan dalam mengurangi deforestasi dicapai dari melakukan perlindungan secara efektif tanah adat dan kawasan lindung, tanah adat dan kawasan lindung di Amazon Brasil diperkirakan mengandung lebih dari 25 miliar ton karbon dan wilayah tersebut dilindungi dalam beberapa bentuk seperti hampir setengah dari wilayah ini disediakan untuk masyarakat adat, sekitar seperlima wilayah ini berada di bawah perlindungan ketat, dan sekitar seperempat ditunjuk untuk pembangunan berkelanjutan, ketiga, tindakan Negara, Negara Brasil telah bertanggung jawab untuk sebagian besar dari kesuksesan Negara dalam mengurangi deforestasi melalui kebijakan inovatif yang diterapkan pemerintah seperti pembayaran ke desa-desa yang hutannya dilestarikan, dukungan untuk proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan, pembayaran kepada keluarga melalui kartu debit, mendukung pendidikan, kesehatan, transportasi dan komunikasi di daerah pedesaan, dan semua ini telah mengurangi deforestasi ke tingkat yang sangat rendah yakni dengan 98% dari hutan yang masih berdiri, keempat, dukungan Norwegia, kontribusi Norwegia dalam mengurangi perubahan iklim sangat berpengaruh di mana Norwegia sepakat untuk mendanai karbon yang dijaga oleh hutan Brasil dan hal ini sebagai bentuk komitmen serius dari Norwegia dalam memerangi perubahan iklim, kelima, ancaman penuntutan, hal ini ditujukan bagi mereka yang melanggar hukum lingkungan, keenam, masyarakat sipil dan mengubah dinamika politik, hal ini guna menekan berbagai

sektor untuk mengurangi deforestasi baik secara ekonomi maupun politik, ketujuh, gerakan untuk *zero deforestation*, masyarakat Brasil telah memainkan peran penting dalam mendorong pemerintah mereka untuk bertindak secara tegas dan melakukan tekanan pada bisnis yang melakukan deforestasi.²⁵ Hal-hal tersebut merupakan kunci pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan proyek REDD+ di Brasil di mana dukungan dan kerja sama dari seluruh sektor sangat menentukan keberhasilan proyek.

Kedua, penulis *Shanti Shrestha, Bhaskar Singh Karky, dan Seema Karki* dalam penulisan laporannya tentang proyek REDD di Nepal yang diterbitkan oleh *Forests Journal* dengan judul *Case Study Report: REDD+ Pilot Project in Community Forests in Three Watersheds of Nepal* menyimpulkan bahwa proyek pilot REDD+ di Nepal merupakan salah satu proyek yang sukses dijalankan karena proyek ini telah mempromosikan pengelolaan hutan lestari dan berhasil diterapkan pada masyarakat lokal di Nepal. Proyek REDD+ ini merupakan proyek dengan prosedur mekanisme yang efektif, efisien, dan adil.²⁶

Proyek REDD+ di Nepal telah menunjukkan beberapa hal yang kemudian menjadikan proyek ini memiliki prosedur yang ideal, yaitu pertama, adanya peningkatan pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan cara meningkatkan tingkat pertumbuhan vegetasi hutan yang kemudian akan menghasilkan penyerapan karbon dengan tingkat yang lebih tinggi, kedua, proyek ini menunjukkan bahwa masyarakat yang didukung dengan pelatihan akan mampu

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Shanti Shrestha, Bhaskar Singh Karky, Seema Karki, *Case Study Report: REDD+ Pilot Project in Community Forests in Three Watersheds of Nepal*, *Forests Journal*, ISSN 1999-4907, 2014.

untuk melaksanakan survei karbon yang bermutu, akurat dan dapat diandalkan, ketiga, mengenai mekanisme pendistribusian keuntungan finansial antara peserta selain dengan memperhitungkan berdasarkan kinerja karbon oleh masyarakat tetapi juga dapat memperhitungkan kebutuhan sosial masyarakat tersebut, keempat, bahwa struktur pemerintahan yang partisipatif dapat membuat proyek ini lebih efektif.²⁷

Pembelajaran lain yang dapat diambil dari pelaksanaan proyek REDD+ di Nepal adalah bahwa keberhasilan pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional akan bergantung pada seberapa baik penanganan atas keprihatinan pada mata pencaharian masyarakat lokal dan masalah ketidaksetaraan serta pengucilan, sebab kebutuhan yang terpenting adalah memiliki perlindungan sosial yang tepat pada masyarakat lokal dengan menjaga inklusi sosial (etnis, gender dan kesejahteraan) di mana hal ini penting untuk membawa perubahan positif dalam perilaku masyarakat lokal dan peningkatan rasa kepemilikan serta komitmen untuk melaksanakan proyek ini.²⁸ Maka, kunci kesuksesan proyek REDD+ adalah dengan menciptakan kesadaran kepada seluruh pihak, membuat perencanaan yang tepat dengan data dasar yang mencukupi, membangun struktur kelembagaan yang jelas, melakukan monitor dan evaluasi secara berkala, dan mendukung kemampuan masyarakat lokal dalam mengatur dan mengelola hutan mereka

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

dengan salah satu caranya yaitu mengatasi keprihatinan kehidupan orang miskin dan secara sosial terpinggirkan.²⁹

Ketiga, penulis *Simon Milledge* dalam penelitiannya berjudul *How corporate governance affects the success of REDD+ projects in Tanzania* yang diterbitkan oleh *The International Institute for Environment and Development* (IIED). Penelitian ini mengkaji tentang pembelajaran-pembelajaran yang dapat diambil untuk membantu proyek REDD+ di Tanzania dalam meraih kesuksesan. Penulis menegaskan bahwa perlunya fokus yang lebih besar untuk memastikan penyebab deforestasi dan risiko yang ditimbulkan, serta dampaknya pada pengurangan manfaat hutan, dan memperbaiki upaya mitigasi yang masih belum efektif.³⁰ Proyek REDD+ harus menjadi bagian dari pendekatan pembangunan berkelanjutan, yang memungkinkan reformasi dalam pembuatan kebijakan dan praktek di sektor deforestasi secara bertanggung jawab, seperti pertanian dan energi.³¹

Peran kunci dalam pelaksanaan proyek REDD+ yakni, pertama, strategi risiko secara berpusat, meningkatkan fokus pada manajemen risiko, kedua, kapasitas dan organisasi otoritas, memastikan kapasitas yang memadai dalam bidang-bidang seperti sistem, tenaga ahli dan teknologi, serta organisasi yang tepat seperti dalam bidang teknis pemantauan karbon, pelaporan dan verifikasi, ketiga, otonomi dalam fungsi utama, pemisahan yang jelas antara peran, otoritas,

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Simon Milledge, *How corporate governance affects the success of REDD+ projects in Tanzania*, The International Institute for Environment and Development (IIED), April 2014.

³¹ *Ibid.*

dan keterlibatan pihak ketiga untuk meningkatkan kredibilitas dan menghindari konflik kepentingan, misalnya di bidang pengumpulan informasi dan pengolahan, pengelolaan dana, audit dan verifikasi, keempat, perjanjian, kemitraan dan hubungan antara pemangku kepentingan harus didasari dengan keadilan, transparansi, dan inklusif untuk menjamin dalam memperhitungkan saat membuat keputusan, dan kemitraan tersebut terkoordinasi antara pemerintah, non-pemerintah, dan organisasi masyarakat madani, kelima, anti-korupsi dan kepatuhan hukum, perlu adanya kepatuhan hukum dalam pengelolaan dana, audit, monitoring dan evaluasi, peningkatan akuntabilitas serta transparansi.³² Hal inilah yang harus diterapkan pada setiap pelaksanaan proyek REDD+ dan telah terbukti cukup efektif dalam menangani risiko tertentu.

Kajian literatur di atas menyajikan pembelajaran-pembelajaran dari kunci sukses dan berhasilnya pelaksanaan proyek REDD+ di beberapa negara. Hal ini dapat menjadi pembandingan dengan mekanisme pelaksanaan proyek REDD+ di Kalimantan Tengah, Indonesia melalui proyek KFCP. Literatur ini dapat membantu penulis menemukan hal-hal yang berbeda antara pelaksanaan proyek REDD+ tersebut dengan proyek REDD+ di Kalimantan Tengah sehingga hasil yang didapat dari pelaksanaan proyek REDD+ ini akan berbeda-beda.

³² *Ibid.*

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Dalam memaparkan, menjelaskan, serta menganalisis permasalahan yang sedang diteliti, penulis menggunakan kerangka pemikiran guna membantu dalam menyajikan data secara komprehensif dan terstruktur. Penulis akan menggunakan teori dan beberapa konsep yang dipandang relevan untuk membantu penulis dalam mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran juga digunakan penulis dalam membentuk jawaban yang terstruktur dari pertanyaan penelitian ini.

Teori utama yang digunakan penulis untuk menganalisis pengelolaan hutan dalam sistem REDD+ yaitu teori *multi-level governance* (MLG). Konsep ini dilatar belakangi dengan ditujukan khususnya untuk memahami proses politik yang terkait dengan munculnya supranasional lembaga seperti Uni Eropa dan untuk memfasilitasi analisis desentralisasi proses pengambilan keputusan di tingkat sistem internasional, nasional, sub-nasional dan masyarakat sipil.³³ Liesbet Hooghe dan Gary Marks mendefinisikan MLG sebagai dispersi otoritas di berbagai tingkat politik pemerintahan, MLG adalah hubungan yang berkaitan antara pemerintah pusat dan aktor-aktor selain pemerintah pusat.³⁴ Seperti kata "*multilevel*" yang ditujukan pada konsep MLG ini terdiri banyak aktor negara dan non-negara yang terletak di berbagai tingkat, yaitu lokal (sub-nasional), nasional, dan global (supranasional) dan tantangan yang diberikan dari teori MLG adalah

³³ Moeko Saito, Jensen, *Theories and Methods for the Study of Multilevel Environmental Governance*, 2015, CIFOR, http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BCIFOR1502.pdf, diakses pada 12 Januari 2017 pukul 09.59 WIB.

³⁴ Gary Marks, *Structural Policy And Multi-Level Governance*, 1993, In A. Carfuny and G. Rosenthal (eds) *The State Of The European Community*, Vol. 2: *The Maastricht Debates And Beyond*, London: Longman.

bahwa tingkat yang beragam dalam pemerintahan tersebut entah bagaimana harus selaras dalam memberikan definisi dan tujuan kolektif.³⁵ Dengan begitu, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis mekanisme REDD dalam proyek KFCP di mana dalam tingkat global (supranasional) yaitu rezim lingkungan dibuat UNFCCC, IAFCP, KFCP, tingkat nasional pemerintah Indonesia, dan tingkat subnasional pemerintah daerah, organisasi-organisasi lokal dan masyarakat setempat yang secara tidak langsung paling berhubungan dengan teknis di lapangan.

Teori yang digunakan penulis dalam membantu penelitian ini adalah liberalisme sebagai salah satu teori besar Hubungan Internasional. Kaum liberalis menganggap bahwa manusia akan selalu bekerja sama sehingga manusia akan mendapatkan manfaat yang besar bagi dirinya dan juga orang lain dan kaum liberalis yakin bahwa akal pikiran manusia akan mampu mengalahkan rasa takut dan nafsu.³⁶ Pandangan dasar kaum liberal yang terakhir adalah percaya dengan adanya kemajuan dan kemajuan berarti kehidupan yang lebih baik untuk setidaknya mayoritas individu.³⁷ Asumsi dasar dari teori ini yaitu dimana sifat positif alamiah yang dimiliki oleh manusia akan membuatnya lebih memilih melakukan sebuah kerja sama dibandingkan hal-hal yang konfliktual dan mereka juga percaya pada proses pelaksanaannya. Liberalisme muncul ketika adanya kepentingan yang sama dan untuk itu manusia percaya jika kerja sama merupakan

³⁵ Ian Bache, Matthew Flinders (eds), *Multi-level governance and environmental policy*. 2004, Oxford, Oxford University Press.

³⁶ Robert Jackson, Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, Edisi ke-4, Oxford/New York: Oxford University Press Inc, 2010.

³⁷ *Ibid.*

jawaban yang tepat untuk meraihnya. Mengenai kepentingan, Hobbes, salah satu pemikir liberalisme percaya bahwa negara dibentuk untuk melindungi kepentingan individu.³⁸ Maka dari itu, dasar dari kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Australia diyakini penulis sebagai upaya untuk melindungi kepentingan individu. Kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam menanggulangi permasalahan isu perubahan iklim merupakan sebuah bentuk aksi kolaboratif akibat adanya kepentingan yang sama dalam inisiatifnya untuk menyelesaikan permasalahan ini dan kerja sama ini tentu diharapkan dapat menghasilkan manfaat. Dari teori ini, penulis akan menganalisis kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam proyek ini.

Dalam perkembangannya, ilmu Hubungan Internasional menjadi bersifat multidisipliner yang di mana artinya untuk memahami suatu fenomena secara utuh, Hubungan Internasional membutuhkan ilmu lain untuk dikaji. Menurut Columbis dan Wolfe, studi hubungan internasional mencakup kajian ilmu politik, ekonomi, hukum, sosiologi, antropologi, serta ilmu pengetahuan alam seperti fisika, kimia, *cybernetic*.³⁹ Sama seperti halnya dalam penelitian ini di mana penulis menggunakan teori politik hijau sebagai teori pendukung yang dapat mendukung penulis untuk mengkaji isu lingkungan. *Green political theory* atau teori politik hijau memiliki perspektif khusus yang berfokus pada hubungan sifat dasar kemanusiaan dengan penggunaan etis ekosentrik. Maksudnya adalah konteks dalam teori demokrasi hijau dan praktik merupakan bentuk dari

³⁸ Mary Ann Glendon, *Rights Talk: The Impoverishment of Political Discourse*, New York, The Free Press, 1991, hlm. 13.

³⁹ Coulombus T. A., Wolfe J. H., *Introduction to International Relations*, Prentice – Hall, 1985.

kepedulian antara pengelaborasi dan internalisasi 'penggunaan etika' dalam lingkungan.⁴⁰

Di bawah ini adalah empat pilar utama yang menjadi landasan konsepsional dari teori politik hijau dalam menetapkan kriteria kebijakan yang bersifat dasar hijau (*green basic*) yang dapat dilakukan oleh suatu negara, yakni:⁴¹

- a. Pembangunan berwawasan pada lingkungan hidup.
- b. Berbasis keadilan ekonomi serta sosial terhadap masyarakat.
- c. Berasaskan pada *Grass Root Democracy*.
- d. Melakukan perdamaian tanpa adanya kekerasan.

Ketika keempat pilar diatas berhasil dilakukan oleh suatu negara dalam menjalankan kebijakan pembangunannya, dengan begitu maka negara tersebut berarti telah berhasil juga dalam melakukan upaya pemeliharaan lingkungan hidup.⁴² Inti dari teori politik hijau dalam Hubungan Internasional adalah untuk membantu menjelaskan krisis ekologi yang tengah dihadapi umat manusia, untuk memberikan fokus pada krisis lingkungan sebagai isu penting bagi masyarakat dan bagaimana menanganinya.⁴³ Upaya Indonesia dan Australia dalam mencegah terjadinya perubahan iklim adalah salah satu upaya dari perwujudan teori politik hijau, yakni dimana negara Indonesia didukung dengan Australia berusaha untuk

⁴⁰ John Barry, *Green Political Theory: Nature, Virtue and Progress*, Univerisity Glasgow, 1996, hlm. 323.

⁴¹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, 2010.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Paterson, *et al*, *Theories of International Relations*, third edition, 2005, hlm. 257.

memenuhi *green basic* dari teori ini guna menciptakan kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan aktor selain negara seperti organisasi non-pemerintah juga merupakan bagian yang penting untuk membantu dalam menerapkan teori ini. Sama halnya dengan mekanisme REDD+ yang sangat membutuhkan kontribusi masyarakat dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal ini PBB sebagai salah satu IGO (*Intergovernmental Organization*) atau rezim global yang salah satu fokusnya adalah tentang lingkungan hidup melahirkan sebuah mekanisme yang disebut dengan REDD, program ini menjembatani negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk sama-sama berupaya dalam penanggulangan krisis perubahan iklim. Interaksi antar negara dalam wadah organisasi internasional adalah turunan dari teori *track one-and-a-half diplomacy* atau diplomasi jalur satu-dan-setengah. Teori ini mengacu pada interaksi resmi antara perwakilan resmi negara di mana sebuah LSM berfungsi sebagai mediator antara dua aktor negara, LSM memfasilitasi diplomasi jalur satu-dan-setengah.⁴⁴ Contoh diplomasi jalur satu-dan-setengah ini terjadi ketika St. Egidio, sebuah LSM Katolik Italia, melakukan perundingan antara kedua belah pihak yang bertikai di Mozambik.⁴⁵ Dalam kasus ini, LSM diberi wewenang oleh masing-masing pihak untuk bernegosiasi dan berhasil menghasilkan mediasi dengan perjanjian damai. Selain itu, pemecahan masalah dalam proses ini melibatkan pejabat resmi negara dari kedua sisi konflik untuk bertindak sesuai kapasitasnya yang dimana keterlibatan ini tercermin dalam

⁴⁴ Susan Allen Nan, *Track I Diplomacy*, <http://www.beyondintractability.org/essay/track1-diplomacy>, 2003, diakses pada tanggal 28 Agustus 2016 pukul 01.13 WIB.

⁴⁵ *Ibid.*

teori diplomasi jalur satu-dan-setengah. Diplomasi jalur satu-dan-setengah mengacu pada kekuatan dari diplomasi jalur satu (otoritas dan sumber daya) dan kekuatan dari jalur dua diplomasi (kreativitas pada diskusi tidak resmi).⁴⁶ Keterlibatan aktor-aktor selain negara dalam penyelesaian suatu isu merupakan inti dari teori ini. Teori ini sangat relevan dengan apa yang terjadi pada pelaksanaan proyek REDD+ dimana para perwakilan resmi negara saling berdiskusi terkait isu deforestasi dan perubahan iklim untuk menciptakan solusi atas masalah tersebut dengan diwadahi UNFCCC sebagai konvensi organisasi internasional PBB beserta kehadiran masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang juga turut berdiskusi tentang hal ini dan akhirnya semua aktor ini bersama-sama mendukung pengimplementasian mekanisme REDD+.

REDD+ merupakan mekanisme yang dilahirkan dari sebuah konvensi internasional UNFCCC di bawah organisasi internasional PBB. Organisasi internasional merupakan salah satu aktor yang sangat memperhatikan isu lingkungan dan hal ini yang menjadi cikal bakal munculnya mekanisme REDD sebagai turunan dari konvensi PBB. Organisasi internasional juga sangat erat kaitannya dengan sebuah kerja sama untuk mencapai visi dan misinya. Contoh model kerja sama misalnya adalah pemberian bantuan luar negeri (*foreign aid*) kepada negara atau suatu aktor yang membutuhkan. Bantuan luar negeri dapat menjadi salah satu bentuk donor yang membantu organisasi tersebut untuk mencapai dan merealisasikan setiap program yang dicanangkannya.

⁴⁶ *Ibid.*

Dalam upaya Indonesia dan Australia melaksanakan mekanisme REDD+, Australia memberikan dana bantuan kepada Indonesia sebagai bentuk dari bantuan luar negeri. Konsep bantuan luar negeri dalam kasus ini digunakan untuk menganalisis bantuan yang diberikan AusAID, sebuah lembaga Pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk mengelola program bantuan luar negeri Australia yang juga mendukung berjalannya proyek KFCP. Bantuan ini juga merupakan hasil dari kerja sama antara Indonesia dan Australia.

Konsep bantuan luar negeri mulai dibangun ketika telah disadari adanya kebutuhan yang harus terpenuhi pada negara-negara belum berkembang maupun negara-negara berkembang. Bantuan luar negeri disediakan oleh tiga jenis donor utama yaitu, pemerintah negara kaya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan yayasan swasta.⁴⁷ Hal ini telah menjadi fokus utama berbagai negara maju khususnya yang tergabung dalam Bank Dunia sesuai apa yang dikatakan presiden Bank Dunia pada saat itu. Secara historis, bantuan diberikan sebagai bantuan bilateral langsung dari satu negara maju ke negara lain yang memiliki pendapatan rendah atau menengah.⁴⁸ Namun, hal ini tetap tidak menutup kemungkinan bahwa donor yang diberikan langsung dapat bersifat multilateral. Sebagai salah satu negara maju seperti halnya Australia kepada Indonesia. Kebijakan pembangunan bantuan Australia atau AusAID yang dibuat oleh Pemerintah Australia memiliki tujuan untuk mempromosikan kemakmuran, mengurangi kemiskinan,

⁴⁷ Roger C. Riddell, *Does Foreign Aid Really Work?*, Oxford Policy Management, <http://devpolicy.org/2014-Australasian-Aid-and-International-Development-Policy-Workshop/Roger-Riddell-Background-Paper.pdf>, diakses pada tanggal 3 April 2016 pukul 21.43 WIB.

⁴⁸ Steven Radelet, *A primer Foreign Aid*, Center for Global Development, 2006, http://www.cgdev.org/files/8846_file_WP92.pdf, diakses pada tanggal 3 April 2016 pukul 22.01 WIB.

meningkatkan stabilitas dan membentuk kerangka kinerja baru yang dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas bantuan Australia dalam setiap program bantuan yang diberikan AusAID.⁴⁹

Bantuan luar negeri termasuk ke dalam instrumen kebijakan luar negeri sehingga kepentingan suatu negara akan mempengaruhi pemberian bantuan tersebut. Bantuan luar negeri untuk masalah lingkungan hidup bukanlah bantuan yang paling vital, hal ini disebabkan isu lingkungan bukanlah menjadi prioritas utama bagi negara Australia. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan bantuan luar negeri sebagai instrumen kebijakan luar negeri terhadap kasus penghentian dana bantuan Australia kepada Indonesia dalam proyek KFCP. Penghentian dana sebagai wujud dari pengambilan keputusan yang dilakukan Australia ini merupakan contoh suatu kebijakan politik luar negeri.

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu metode dengan model kualitatif. Penelitian kualitatif ini cenderung menggunakan pertanyaan terbuka sehingga peneliti dapat ikut serta dalam mengekspresikan pandangan mereka dan proses dari penelitian kualitatif sebagian

⁴⁹ *Australia's Aid Program*, Australia Aid, <http://dfat.gov.au/aid/Pages/australias-aid-program.aspx>, diakses pada tanggal 2 April 2016.

besar bersifat induktif yang dapat memberikan sebuah gambaran atau peristiwa dari kegiatan penelitian terhadap data yang ada di lapangan.⁵⁰

Selain metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dimana penelitian ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik yang sedang terjadi pada saat ini maupun pada saat lampau, menurut seorang metode penelitian, Furchan, salah satu karakteristik penelitian yang bersifat deskriptif yaitu, penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaahnya secara teratur dan ketat, mengutamakan obyektivitas, serta dilakukan secara cermat.⁵¹ Maka, melalui metode penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengkaji dan memberikan gambaran secara sistematis sehubungan dengan fenomena yang telah terjadi di waktu lampau, namun kejadiannya dapat mempengaruhi fenomena di masa yang akan datang dengan memberikan pembelajaran-pembelajaran terkait fenomena yang telah terjadi.

1.5.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yang memiliki fungsi untuk menguraikan, membandingkan, dan menjelaskan suatu masalah. Data yang diambil untuk

⁵⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* 2nd Ed, London: Sage Publication, Inc., 2003, hlm. 9.

⁵¹ A Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, hlm. 54.

mendukung penelitian ini berasal dari laporan berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, dan catatan resmi lainnya.⁵² Melalui jenis penelitian studi kasus ini, penulis dapat memahami fenomena atau situasi yang terjadi.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini utamanya adalah studi dokumen berupa data sekunder yang diambil dari buku, jurnal, skripsi, dan majalah terkait yang tentunya dapat menunjang penelitian ini dan memberikan data yang akurat serta relevan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data primer seperti dari situs resmi di internet dan laporan tahunan dari organisasi terkait yang dapat mendukung penulis untuk melakukan penelitian ini.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini terbagi dalam empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab 1. Pada bab satu penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, deskripsi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah berupa pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian

⁵² M. Arifin, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Agama dan Ilmu Sosial*, Malang: Kalimasada Press, 1994, hlm. 45.

literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, dan teknik pengumpulan data, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan untuk penelitian ini.

Bab 2. Pada bab dua penulis akan menganalisis tentang permasalahan deforestasi di Kalimantan Tengah yang menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca serta penjelasan tentang pentingnya menjaga kondisi hutan tropis dan bagaimana kerja sama Indonesia dan Australia dalam menangani permasalahan ini.

Bab 3. Pada bab tiga penulis akan menganalisis perkembangan sistem perdagangan karbon (*carbon trading*) pada REDD dan REDD+ dalam proyek KFCP serta penulis akan mulai menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proyek KFCP dengan menjawab pertanyaan penelitian **“Bagaimana kerja sama Indonesia dan Australia dalam upaya pengimplementasian mekanisme REDD+ di wilayah Kalimantan Tengah melalui proyek *Kalimantan Forests & Climate Partnership* (KFCP)?”**

Bab 4. Pada bab empat penulis akan memberikan kesimpulan serta hasil akhir analisa yang telah dilakukan dan ditulis penulis pada bab 3 sebelumnya.